



Rapat Paripurna LPjP APBD Tahun Anggaran 2019

Realisasi Pendapatan Capai Rp1.032,36 M



HUMASKAB FOR PONTIANAK POST

PENYERAHAN DRAF: Wakil Bupati Mempawah Muhammad Pagi menyerahkan LPJP APBD Tahun Anggaran 2019 kepada Ketua DPRD Kabupaten Mempawah Ria Mulyadi dalam Sidang Paripurna DPRD, belum lama ini.

MEMPAWAH - Wakil Bupati (Wabup) Mempawah mengungkapkan jika sektor pendapatan pada APBD Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp1.032,36 miliar.

Memang diakui dia sedikit meleset dari target yang ditetapkan mereka sebesar Rp1.050,21 miliar. Hal tersebut disampaikan Wabup dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan

(LPJP) APBD Tahun Anggaran 2019 di hadapan anggota legislatif.

“Realisasi capaiannya sebesar 98,30 persen,” ucap Wabup dalam sidang yang berlangsung di Gedung



DPRD Kabupaten Mempawah tersebut, belum lama ini. Pendapatan ini dijelaskan dia, terdiri dari PAD Rp87,57 miliar, transfer dana perimbangan (Rp912,35 miliar), dan lain-lain pendapatan yang sah, Rp32,43 miliar.

Kemudian, lanjut Wabup, pada sektor belanja sebesar Rp885,20 miliar dari total anggaran belanja sebesar Rp954,90 miliar. Artinya, dia menambahkan, penyerapan belanja pada APBD Tahun Anggaran 2019 lalu mencapai 92,70 persen. "Belanja ini terdiri dari belanja operasi sebesar Rp708,57 miliar, belanja modal (sebesar) Rp176,19 miliar, dan belanja tak terduga Rp435,96 juta dari anggaran yang ditetapkan Rp1,50 miliar dengan penyerapan 29,06 persen," tuturnya.

Tak hanya itu, masih menurut Wabup, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah juga melakukan transfer dengan total

Rp132,86 miliar. Angka tersebut, menurut dia, terdiri dari transfer bagi hasil pajak daerah Rp3,58 miliar, bagi hasil retribusi daerah (Rp662,06 juta), bantuan keuangan ke desa (Rp127,49 miliar), serta bantuan keuangan lainnya, Rp1,12 miliar.

"Serta pos pembiayaan APBD 2019 yang digunakan untuk menutupi defisit dan surplus anggaran dalam APBD terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp44,25 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp5 miliar," kata dia.

Semua laporan setebal 24 halaman tersebut disampaikan Wabup di hadapan anggota legislatif pada sidang yang dipimpin Ketua DPRD, Ria Mulyadi. "Kami mohon maaf kepada pimpinan dan anggota DPRD Mempawah jika terlambat dalam penyampaian LPJP APBD 2019. Keterlambatan ini disebabkan adanya perubahan jadwal pemeriksaan laporan keuangan Pemkab

Mempawah dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan dari BPK-RI Perwakilan Kalbar," terang Wabup.

Wabup menjelaskan, Pemkab telah menyampaikan laporan keuangan tahun anggaran 2019 kepada BPK-RI Perwakilan Kalbar sejak 16 Maret 2019. Kemudian, dia menambahkan, BPK-RI melakukan pemeriksaan dalam dua tahapan, yakni pemeriksaan interim dan pemeriksaan terperinci.

"Pemeriksaan interim dilaksanakan pada tanggal 10 - 29 Februari 2020, sedangkan pemeriksaan terperinci dimulai pada tanggal 19 April - 20 Mei 2020 yang melibatkan tim gabungan tim auditor BPK-RI Kalbar dan akuntan publik Jakarta," paparnya.

Hasilnya, ungkap Wabup, laporan keuangan Pemkab mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Keberhasilan tersebut, menurut Wabup, merupakan kali keempat

sejak tahun 2016 lalu.

"Opini ini merupakan predikat tertinggi yang diberikan BPK-RI terhadap laporan keuangan daerah. Karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Mempawah," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Wabup mengajak seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mempawah, untuk bersama-sama mengawal proses anggaran mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Harapannya agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap aturan keuangan.

"Kami juga mohon maaf kepada jajaran legislatif dan masyarakat jika dalam penggunaan anggaran harus dilakukan dengan selektif dan tegas, guna menghindari terjadinya pelanggaran aturan yang telah ditetapkan," ujarnya. (wah)